

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kota dapat dipahami sebagai sebuah ruang luas yang mewadahi berbagai aktivitas masyarakatnya, yang lebih didominasi oleh aktivitas bersifat kekotaan (bukan kegiatan pertanian). Menurut Rukayah (2005), faktor kebutuhan manusia merupakan salah satu unsur penggerak perilaku manusia untuk beraktivitas, yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan (*satisfying human needs*). Namun demikian, tiap-tiap orang akan memiliki persepsi yang berbeda terhadap *satisfying human needs* ini, karena akan disesuaikan dengan budayanya, pengalaman, sistem nilai yang dianut serta motivasi tertentu yang akan mengarahkan pada aktivitas tertentu pula. Masyarakat kota dengan kecenderungan cara berpikir yang lebih inovatif daripada masyarakat desa, telah banyak berpengaruh pada aktivitas yang berlangsung dalam ruang kota. Hal ini dapat dilihat dari jenis, jumlah serta kedinamisan aktivitas yang terjadi. Berbagai aktivitas dalam ruang kota ini merupakan bentuk aplikasi upaya manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya, aktualisasi diri serta pengungkapan aspirasi dan ekspresi. Dari sinilah timbul konsekuensi akan kelengkapan sarana prasarana yang mampu mendukung pelaksanaan aktivitas masyarakat, baik yang berupa ketersediaan ruang penyelenggaraan aktivitas, maupun ketersediaan fasilitas dan utilitas penunjangnya. Penggunaan ruang kota bagi pelaksanaan aktivitas serta penyediaan berbagai sarana prasarana ini selanjutnya akan secara langsung menentukan pola ruang yang terbentuk dalam suatu kawasan kota. Hal ini dikarenakan, suatu pola ruang akan muncul ketika terdapat aktivitas yang berlangsung didalam ruangan tersenbut.

Penyampaian aspirasi merupakan salah satu bentuk aktivitas masyarakat untuk mengutarakan pemikiran, mengungkapkan gagasan serta menyuarakan suatu persoalan, yang biasanya kurang mendapatkan perhatian dalam kehidupan kota-kota di Indonesia. Untuk aktivitas penyampaian aspirasi ini, masyarakat Indonesia masih menemui keterbatasan pada sarana dan prasarana penunjangnya, bahkan ketidakterediaan ruang bagi penyelenggaraannya. Dari sini dapat diindikasikan bahwa masyarakat hampir tidak mempunyai suatu saluran komunikasi kedalam sistem pemerintahan yang bersifat langsung dan publik. Sementara yang perlu diingat bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang berasaskan demokrasi. Azas pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ketidakadaan 'sambungan' antara masyarakat dengan pemerintah inilah yang sering kali mendorong orang-orang untuk mewujudkan aktivitas penyampaian aspirasi melalui suatu gerakan demonstrasi. Suatu bentuk aktivitas penyuaran aspirasi yang umumnya ditandakan oleh sekumpulan massa yang turun ke jalan atau tempat-tempat tertentu di dalam kota untuk mengutarakan pernyataan sikap atas suatu persoalan,

menggalang perhatian, dan opini publik serta memberikan *social pressure* kepada pihak-pihak yang dituju. Maka tanpa adanya suatu ruang khusus yang disediakan bagi pelaksanaan kegiatan demonstrasi, wajar saja jika kegiatan ini sering kali digelar pada ruang-ruang publik kota dengan maksud agar diketahui oleh berbagai pihak, dan isu yang dibawa dalam demonstrasi lebih cepat tersebar di masyarakat luas.

Berbagai demonstrasi yang terjadi pada beberapa kota di Indonesia merupakan fenomena tersendiri yang menarik untuk diteliti lebih dalam, terutama pengaruhnya terhadap pola ruang aktivitas kawasan yang terbentuk pada saat demonstrasi digelar serta konsekuensi ruangnya. Penelitian ini berupaya untuk menemukan pola ruang aktivitas demonstrasi pada Kawasan Simpang Lima Semarang. Kawasan Simpang Lima dipilih karena berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan Kawasan Simpang Lima merupakan ruang publik kota yang paling sering dijadikan sebagai lokasi pelaksanaan demonstrasi-demonstrasi di Kota Semarang. Sementara, Kota Semarang sendiri merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah yang sedang berkembang menuju kota metropolitan, dengan mendapat pengaruh besar dari Kota Jakarta disisi barat dan Kota Surabaya disisi timur.

### **1.1.1 Simpang Lima, *Public Space* di Kota Semarang**

Suatu produk ruang publik merupakan kebutuhan yang bersifat mutlak dalam sebuah kota. Kota-kota klasik mewujudkan ruang publik kota sebagai suatu tempat terbuka dimana masyarakat bertemu, berkumpul dan berinteraksi dengan sesamanya, baik untuk kepentingan keagamaan, perdagangan maupun membangun pemerintahan. Ruang publik kota telah memainkan peran tersendiri sebagai pusat interaksi masyarakat kota. Selain itu, ruang publik kota juga memiliki fungsi tradisional sebagai simbol yang menjadi identitas dan tanda pengenal dari sebuah kota. Tidak mengherankan jika pada perkembangan selanjutnya banyak kota yang memanfaatkan ruang publik sebagai simbol sekaligus pusat interaksi sosialnya. Beberapa kota membangun ruang publik berupa pusat-pusat kebudayaan, taman kota, plaza atau bahkan dalam bentuk monumen.

Berbagai peristiwa yang berlangsung dalam ruang publik kota baik yang berupa pertemuan antar individu, antara pemerintah dengan warga maupun antara penduduk setempat dengan pendatang, merupakan jiwa yang mampu mengakrabkan antar komunitas dalam kota. Fungsi dan peranan ruang publik menjadi semakin luas terutama pada perkembangan kota-kota di berbagai belahan dunia saat ini. Jika sebelumnya ruang publik selalu diandaikan juga sebagai ruang terbuka, kini ruang publik memiliki makna kultural dan politiknya sekaligus. Ruang publik ditafsirkan sebagai tempat yang memungkinkan setiap warga tanpa deskriminasi dapat berinteraksi dan bertemu dengan kesederajatan dan yang lebih penting memiliki akses untuk menggunakannya (Ahmad, 2002; 30).

Perkembangan Kota Semarang dari awal pembentukannya memiliki pola tradisional organis sebagai kota kabupaten. Dalam proses perkembangannya selama lebih dari 350 tahun dipengaruhi oleh kebudayaan kolonial Belanda. Ruang publik yang ada di Kota Semarang pun tak terlepas dari fungsi-fungsi diatas. Salah satu ruang publik yang sekaligus berperan sebagai *landmark* kota adalah kawasan Simpang Lima Semarang, yang berlokasi di pusat kota. Sebagaimana umumnya di berbagai kota besar, Simpang Lima sebagai ruang publik di pusat kota memiliki kepadatan dan kesibukan kawasan yang tinggi. Kepadatan bangunan maupun lalu lintas transportasi terkonsentrasi pada jalan-jalan raya di sekeliling kawasan ini. Sedangkan aspek kehidupan yang menonjol pada kawasan Simpang Lima mencakup aspek fungsional dan sosial. Akibatnya, akumulasi moda transportasi di pusat kota menjadi demikian kompleks, dengan keharusan untuk menyediakan fasilitas parkir, trotoar bagi jalur pejalan kaki, *mall*, *plaza* serta berbagai kepentingan lainnya.

Bila di Negara Yunani dikenal dengan adanya 'Agora', maka pada masa kejayaan Romawi dapat ditemukan keberadaan 'Forum'. Agora dan forum memiliki fungsi yang hampir sama, yaitu sebagai pusat kehidupan politik dan perdagangan. Kedua tempat ini merupakan suatu *public space* berupa ruang terbuka yang diperuntukan bagi pertemuan semua warga guna membicarakan berbagai hal termasuk urusan politik dan negara. Hingga saat ini kesadaran akan pentingnya suatu ruang publik sebagai salah satu wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pemikirannya, ternyata direspon baik oleh beberapa negara. Ruang-ruang publik khusus bagi kegiatan penyuaran aspirasi masyarakat sengaja disediakan di dalam kota. Misalnya *Speakers Corner* yang ada di London, *Sneaker's Corner* di Singapura serta *Spreeksteen* di Belanda. Tempat-tempat tersebut merupakan area dimana publik bebas berbicara. Orang-orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pemikirannya mengenai berbagai permasalahan.

Lain halnya dengan Kota Semarang yang hingga saat ini tidak mempunyai suatu sarana berupa tempat khusus yang fungsinya menyerupai ruang-ruang sejenis *Speakers Corner*. Tidak mengherankan bila kepentingan masyarakat untuk mengemukakan pikiran, berpolitik maupun berdemonstrasi seringkali dilakukan pada tempat-tempat yang tidak semestinya. Kondisi inilah yang dihadapi oleh kawasan Simpang Lima. Sebagai akibatnya terjadi percampuran aktivitas bagi berbagai kepentingan dalam penggunaan ruangnya. Bila mengingat peruntukan kawasan Simpang Lima sebagai kawasan perdagangan dan jasa, perkantoran serta budaya, kegiatan demonstrasi memang tidak seharusnya dilakukan di tempat ini. Namun bila memperhatikan sifat kegiatan demonstrasi yang menghendaki terbentuknya suatu opini publik, maka tidak mengherankan jika kawasan Simpang Lima menjadi lokasi pelaksanaan aksi, karena kawasan ini banyak dikunjungi oleh orang dari berbagai penjuru kota.